

### **BAB III**

#### **ANALISIS DATA**

##### **A. Implikasi Geopolitik dalam Upaya Pemenuhan Energi Turki**

Isu geopolitik menjadi salah satu tema yang tidak dapat dipisahkan dalam analisis kajian keamanan energi. Semakin meningkatnya interdependensi antar negara, dalam bidang kerja sama energi, menjadikan isu geopolitik menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan mengenai pemenuhan energi, baik dalam mengamankan pasokan energi maupun memenuhi permintaan dari dalam negeri<sup>1</sup>.

Semakin menguatnya peran kepentingan energi, yang diperlihatkan pada besarnya keperluan dan permintaan pasar domestik akan sumber energi fosil, seperti minyak bumi dan gas alam, memaksa Pemerintah Turki untuk bergantung pada pasokan energi impor. Dalam upaya pemenuhan energi tersebut, perhitungan geopolitik akan memberikan dampak positif, baik bagi upaya Turki dalam memenuhi permintaan energi domestik, maupun dalam meningkatkan peran Turki dalam upaya kerja sama energi global.

Pasca pecahnya Krisis Ukraina di tahun 2014, perubahan geopolitik sangat terasa bagi kawasan di sekitar Turki. Suatu konflik yang terjadi tepat di kawasan yang secara geografis sangat dekat dengan wilayahnya, tentu membawa konsekuensi tersendiri bagi Turki, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Krisis Ukraina pun ikut membawa dampak bagi dinamika kerja sama energi di kawasan sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan Perang Dingin baru

antara Rusia menghadapi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Oleh karena itu, isu geopolitik, menjadi faktor berpengaruh dalam upaya pemenuhan energi, yang perlu untuk dikaji dalam studi keamanan energi.

### **1. Implikasi Perang Dingin dalam sektor energi**

Konflik di Ukraina tentu memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perubahan tatanan politik global pasca runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991. Terbentuknya kekuatan-kekuatan baru seperti Rusia dan Tiongkok, menjadi tantangan sendiri bagi kekuatan hegemoni Amerika Serikat dan Uni Eropa, menjadi awal dari kemunculan kembali sistem multipolar dalam hubungan internasional.

Dalam bidang energi, krisis antara Rusia dan Ukraina di tahun 2009 telah menjadi peringatan pertama bagi Uni Eropa, dalam mengamankan keamanan pasokan energinya. Pada tanggal 7 Januari 2009, Rusia melalui perusahaan energi, Gazprom mengumumkan penghentian pengiriman pasokan gas dari Rusia menuju ke Ukraina, akibat dari sengketa energi antara Moskow dan Kyiv. Penghentian pasokan gas Rusia menuju Ukraina tersebut, memberi dampak kepada terganggunya suplai gas alam dari Rusia menuju ke kawasan Eropa Selatan, yang mana pasokan gas tersebut harus dialirkan melalui pipa gas yang melalui wilayah Ukraina<sup>2</sup>.

Setelah keputusan penghentian pasokan gas alam dari Rusia ke Ukraina tersebut, Uni Eropa segera mengekspresikan keberatannya pada keputusan Rusia, yang mengakibatkan terjadinya krisis energi di beberapa negara anggotanya. Keberatan tersebut ditunjukkan dari pernyataan<sup>3</sup>:

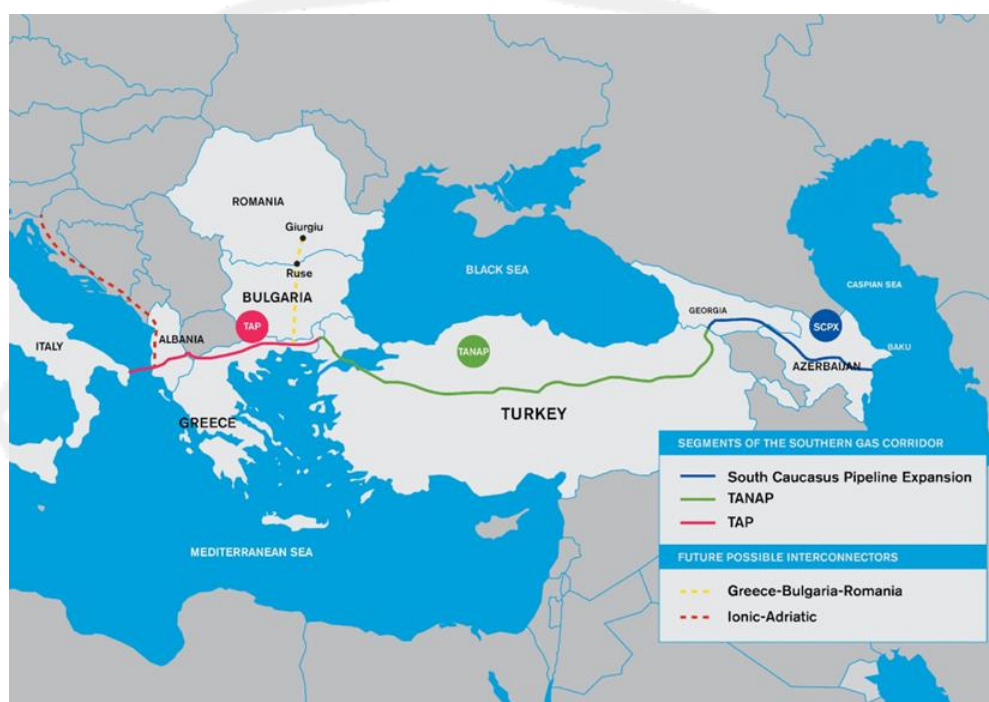
*Given the importance attached to solidarity within the EU, this is a problem for the EU as such. It is unacceptable for the EU to see its citizens and enterprises suffering from gas shortages due to the non-respect by both partner countries of their contractual obligations and calls on both parties to accept independent monitoring of the actual flows of gas through the pipelines.*

Menghadapi krisis pasokan energi akibat sengketa antara Rusia dan Ukraina tersebut, Uni Eropa segera mengambil posisi sebagai fasilitator dalam menemukan solusi mengakhiri sengketa energi antara kedua negara. Menyediakan pengawas independen dalam memonitor laju pasokan gas Rusia yang melewati wilayah Ukraina.

Sengketa energi antara Moskow dan Kyiv di tahun 2009, ternyata memiliki implikasi besar bagi ketersediaan pasokan energi gas alam bagi beberapa negara di Uni Eropa. kemunculan sengketa tersebut, menjadi “*wake-up call*” bagi Uni Eropa, dalam upaya mengamankan pasokan energinya, terutama yang terkait mengenai pasokan energi dari Rusia<sup>4</sup>. Menyusul adanya kekhawatiran mengenai keadaan yang serupa, Uni Eropa mulai mempertimbangkan beberapa rute alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan energinya. Hal itu ditunjukkan dengan disepakatinya beberapa proyek infrastruktur, seperti *Southern Gas Corridor* yang dimaksudkan untuk mendiversifikasi pemasok gas alam bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Peningkatan kerja sama energi, dalam rangka diversifikasi pasokan

gas alam oleh Uni Eropa, ditunjukkan dengan peningkatan kerja sama dengan negara-negara transit energi, seperti Turki, Azerbaijan, dan Georgia, dalam mendukung pembangunan pipa gas alam seperti TANAP dan Trans-Adriatic Pipeline (TAP)<sup>5</sup>.

**Gambar 3: Proyek Infrastruktur Southern Gas Corridor**



Sumber: <https://socar.de/en/socar-2/southern-gas-corridor/>

Diakses pada: 30 Desember 2022

Pada tahun 2014, turbulensi politik dalam negeri Ukraina, akibat adanya pertentangan diantara kubu Pro-Eropa dan Pro-Rusia, serta diikuti dengan intervensi negara-negara asing seperti Rusia, membawa suatu krisis di Ukraina menuju skala yang lebih besar. Bagi para peneliti hubungan internasional, Krisis di Ukraina dianggap sebagai awal dari dimulai Perang

Dingin 2.0, dan hal itu tentu mempengaruhi dinamika kerja sama energi antara Rusia, sebagai salah satu eksportir energi terbesar, dan Uni Eropa.

Sebagai upaya menggalang solidaritas kepada Ukraina atas adanya aneksasi ilegal atas Semenanjung Krimea oleh Rusia, Uni Eropa bersama dengan Amerika Serikat dan beberapa sekutunya menerapkan sanksi ekonomi kepada Rusia, dalam upaya memaksa Rusia untuk menarik pasukannya dari wilayah Krimea. Salah satu sanksi yang diterapkan oleh Uni Eropa kepada Rusia tersebut, salah satunya termasuk yang berkaitan pada sektor finansial dan energi. Sejak tahun 2014, Uni Eropa telah menerapkan pembatasan volume impor energi dari Rusia, terutama dalam impor batu bara serta minyak bumi, dengan beberapa pengecualian<sup>6</sup>.

## **2. Turki diantara persaingan energi antara Barat dan Rusia**

Persaingan geopolitik antara barat dan Rusia, sebagai konsekuensi dari Krisis Ukraina, memberikan Turki peluang yang cukup potensial dalam upaya pemenuhan energinya. Memberikan Turki kesempatan untuk menjadi salah satu aktor utama yang bermain dalam isu geopolitik dan juga dalam pengembangan kerja sama energi global, dimana pada masa modern ini, memainkan peranan penting bagi setiap negara.

Berdasarkan letak secara geografis, Turki berpeluang besar menjadi koridor energi yang stabil, menjadi jembatan bagi kepentingan Rusia menjadi penyedia energi, dan upaya Uni Eropa dalam pemenuhan kebutuhan energinya. Namun upaya ini menjadi tantangan tersendiri,

ditengah bergolaknya Krisis Ukraina, yang menjadi awal dari perang proksi antara barat dan Rusia, di kawasan Eropa.

Sejak awal dimulainya Krisis Ukraina pada awal tahun 2014, Turki telah mengecam aneksasi Semenanjung Krimea oleh Rusia, serta terlibat aktif secara politik, dalam membantu Ukraina mendapatkan kembali Krimea melalui jalan diplomasi. Namun ditengah dukungannya pada integritas wilayah teritorial Ukraina, serta keanggotaannya pada NATO, sepanjang krisis, Turki mengambil sikap netral<sup>7</sup>. Pada saat bersamaan, Turki menawarkan diri sebagai inisiator perdamaian dan memfasilitasi upaya dialog antara pihak yang bertikai, yakni Rusia dan Ukraina.

Sikap netral dalam Krisis Ukraina ini, dapat dipahami melalui arah dasar politik luar negeri Turki, *Zero Problems with the Neighbors*, yang diperkenalkan pada tahun 2004. Arah dasar kebijakan ini berakar dari pemikiran bapak bangsa Turki, Mustafa Kemal Ataturk, dan berupaya untuk memprioritaskan jalan damai, dalam rangka peningkatan kerja sama Turki dan negara-negara tetangga, menjaga stabilitas agar perdagangan dapat terus berjalan<sup>8</sup>. Dalam praktiknya, prinsip tersebut juga diterapkan, dalam upaya memperkuat kemitraan dalam kawasan dalam sektor energi, menyusul dengan strategis Turki menjadi jembatan energi global.

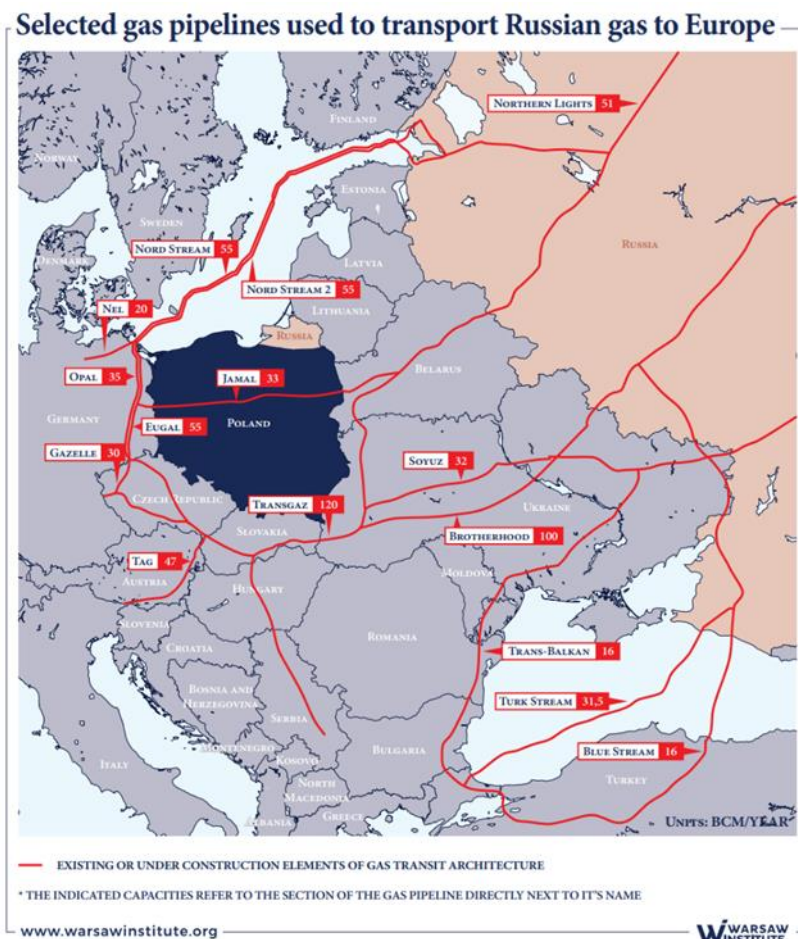
Sengketa energi antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2009, telah menyebabkan krisis pasokan energi gas alam bagi beberapa negara anggota Uni Eropa. Krisis ini memberikan kesadaran akan pentingnya alternatif rute energi baru, untuk memenuhi kebutuhan energi Eropa, tanpa melewati

wilayah Ukraina. Turki dengan situasi wilayah geografisnya, menjadi negara transit potensial. Pada tanggal 26 Juni 2012, suatu kesepakatan ditandatangani oleh Pemerintah Turki dengan Azerbaijan, untuk dimulainya proyek pembangunan pipa gas, yang bernama *Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline System*, atau yang lebih dikenal dengan TANAP<sup>9</sup>. Kesepakatan pembangunan pipa gas alam, TANAP, ini menjadi satu kesatuan dari proyek *Southern Gas Corridor*, yang mengupayakan jalur distribusi pasokan gas alam, dari Laut Kaspia, menuju pasar energi di Eropa<sup>10</sup>.

Potensi geografis Turki tersebut, tidak hanya disadari oleh Uni Eropa saja, namun juga oleh Rusia. Pecahnya turbulensi politik di Ukraina pada awal tahun 2014, serta upaya aneksasi Semenanjung Krimea oleh pasukan Rusia, menyebabkan ruang manuver Rusia dalam kerja sama di sektor energi, menjadi lebih sempit. Memburuknya hubungan bilateral antara Moskow dan Kyiv, akibat aneksasi Semenanjung Krimea, menjadi alasan bagi Rusia untuk mencari rute energi baru, salah satu strategi yang diambil adalah dengan mencari jalur alternatif lain dalam menghubungkan pasokan energinya ke pasar Eropa, melalui rute yang lebih aman, yakni melalui Laut Baltik dalam proyek Nord Stream dengan Jerman dan Laut Hitam melalui proyek TurkStream dengan Turki<sup>11</sup>.



**Gambar 4: Jalur pipa gas dari Rusia menuju Turki dan Eropa**



Sumber: [https://newdirection.online/2018-publications-](https://newdirection.online/2018-publications-pdf/IN%20RUSSIA%E2%80%99S%20GAS%20GRIP%20-%20NORD%20STREAM%202%20AND%20TURKSTREAM%20-%20New%20Direction%20Report%20-%20Krzysztof%20Kami%C5%84ski.pdf)

[pdf/IN RUSSIA%E2%80%99S GAS GRIP -](https://newdirection.online/2018-publications-pdf/IN%20RUSSIA%E2%80%99S%20GAS%20GRIP%20-%20NORD%20STREAM%202%20AND%20TURKSTREAM%20-%20New%20Direction%20Report%20-%20Krzysztof%20Kami%C5%84ski.pdf)

[NORD STREAM 2 AND TURKSTREAM - New Direction Report -](https://newdirection.online/2018-publications-pdf/IN%20RUSSIA%E2%80%99S%20GAS%20GRIP%20-%20NORD%20STREAM%202%20AND%20TURKSTREAM%20-%20New%20Direction%20Report%20-%20Krzysztof%20Kami%C5%84ski.pdf)

[Krzysztof Kami%C5%84ski.pdf](https://newdirection.online/2018-publications-pdf/IN%20RUSSIA%E2%80%99S%20GAS%20GRIP%20-%20NORD%20STREAM%202%20AND%20TURKSTREAM%20-%20New%20Direction%20Report%20-%20Krzysztof%20Kami%C5%84ski.pdf)

Diakses pada: 9 Agustus 2022

Pada tahun 2007, Rusia dan Bulgaria telah menandatangani perjanjian pembangunan infrastruktur pipa gas, dalam proyek South Stream, proyek ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas distribusi pasokan gas alam dari



Rusia ke Uni Eropa, melalui Laut Hitam. Namun akibat upaya Rusia menganeksasi Krimea pada bulan Maret 2014, Pemerintah Bulgaria atas tekanan dari Uni Eropa, terpaksa menangguhkan proyek pipa gas South Stream tersebut. Dibatalkannya proyek South Stream tersebut, menjadi alasan bagi Rusia untuk mengalihkan jalur pipa gasnya di Laut Hitam menuju Turki<sup>12</sup>. Pada tanggal 1 Desember 2014, Turki dan Rusia yang diwakili oleh kedua perusahaan energi milik negara, yakni BOTAS dan Gazprom, menandatangani kesepakatan proyek pipa gas alam, TurkStream, yang akan menghubungkan wilayah Rusia dan Turki melalui Laut Hitam. Jalur pipa gas TurkStream ini sendiri telah mulai beroperasi pada bulan Januari 2020, dan melalui dua pipa gasnya mengalirkan pasokan energi gas sebesar 31,5 BCM, yang masing-masing dibagi untuk memenuhi kebutuhan energi gas dalam negeri Turki sebesar 15,75 BCM maupun menuju ke pasar Eropa sebesar 15,75 BCM<sup>13</sup>.

Dalam konteks geopolitik pada masa Perang Dingin 2.0 antara Rusia menghadapi Amerika Serikat dan Uni Eropa, Turki memiliki peran yang sangat bernilai, terutama yang berkaitan mengenai kerja sama energi. Pada masa modern ini, tidak dapat dihindarkan lagi, bahwa kebutuhan energi sangat diperlukan oleh hampir seluruh negara di dunia, namun isu geopolitik terkadang menjadi halangan bagi upaya pemenuhan pemenuhan energi tersebut. Dalam konteks Perang Dingin baru di Eropa ini, Turki dengan wilayah geografisnya, menawarkan akomodasi bagi kepentingan dua pihak yang saling berseteru. Bagi Uni Eropa, strategi koridor energi Turki memberikan alternatif pemasok energi lain selain dari Rusia. Bagi

Rusia, Turki menawarkan suatu peluang baru bagi kepentingannya menjadi eksportir energi gas terbesar bagi Eropa, dengan suatu jalur transit yang tidak melalui wilayah Ukraina, yang tidak stabil, baik dari segi keamanan maupun hubungan politik antara Moskow dan Kyiv.

## **B. Kepentingan Ekonomi dalam Keamanan Energi Turki**

Kepentingan ekonomi dan keamanan energi memiliki korelasi antara satu dengan yang lainnya. Berjalannya perekonomian Turki, sangat dipengaruhi dengan keamanan pasokan energi, dikarenakan hampir setiap sektor ekonomi Turki, digerakkan oleh konsumsi energi yang besar, sehingga dengan realita tersebut, perlu adanya sinkronisasi antara kepentingan ekonomi dan penyediaan energi.

Dengan ketergantungan antara ketersediaan pasokan energi dengan sektor perekonomian, menyebabkan upaya pemenuhan energi menjadi sangat vital bagi Turki. Dalam hukum ekonomi, kenaikan jumlah permintaan, tidak didukung dengan pasokan energi yang mencukupi, dapat mempengaruhi stabilitas harga yang semakin meningkat, dan hal itu akan mempengaruhi sektor perekonomian.

Dalam menopang kepentingan ekonomi, diperlukan suatu ketahanan energi yang berkelanjutan dan dapat diandalkan. Hampir setiap sektor vital dalam negeri Turki, memerlukan pasokan energi yang cukup tinggi, terutama permintaan akan energi berbahan dasar fosil, seperti sektor industri, perumahan, transportasi, energi listrik, jasa, dan lain sebagainya. Diperlukan suatu strategi penyediaan energi yang berkesinambungan, menjaga harga pasar, serta menciptakan regulasi pengelolaan

energi yang kooperatif dan kompetitif, sehingga dapat meningkatkan peluang investasi yang lebih baik.

Bagi Turki, upaya menjaga keberadaan pasokan energi, sebagai upaya mengamankan laju perekonomian, ditunjukkan dari beberapa hal berikut, seperti:

1. memastikan ketersediaan pasokan energi sebagai upaya mengamankan kepentingan ekonomi dalam negeri, 2. kebijakan liberalisasi ekonomi terutama dalam sektor energi. Memastikan agar pasar energi Turki lebih kompetitif dan dapat terintegrasi dengan kepentingan geopolitik regional.

Dalam setiap tahun, Turki mengeluarkan biaya impor energi sebesar 40 milyar USD, untuk memenuhi pasokan energi fosil, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara<sup>14</sup>. Krisis Ukraina juga memberi dampak tersendiri bagi upaya Turki dalam menjaga harga pasar energinya. Pada tanggal 1 September 2022, Otoritas Regulasi Pasar Energi (EMRA) bersama dengan BOTAS, mengumumkan kenaikan harga energi listrik dan gas untuk konsumen dalam negeri Turki, bagi sektor industri dikenakan kenaikan harga energi listrik sebesar 50%, begitupula dengan sektor publik dan perumahan yang dikenai kenaikan harga 30% dan 20%. Kenaikan harga energi tersebut, juga mempengaruhi kebijakan kenaikan harga gas alam untuk beberapa sektor domestik<sup>15</sup>.

Kenaikan harga energi tersebut, telah memberi dampak pada sektor industri Turki. Salah satu sektor yang terpengaruh adalah industri baja. Beberapa pabrik baja Turki mempertimbangkan untuk menghentikan produksi, dikarenakan kurangnya permintaan dan tingginya biaya produksi. Salah satu penyebab tingginya

harga produksi tersebut adalah kenaikan harga energi listrik. Kenaikan biaya produksi tersebut, tidak mampu diakomodasi oleh beberapa pabrik baja dalam meneruskan produksinya, ditengah jumlah permintaan yang menurun akibat kondisi ekonomi Turki yang sedang menurun<sup>16</sup>.

Kemudian dalam rangka membangun iklim pasar energi yang kompetitif dan dapat diandalkan, upaya liberalisasi pasar dalam sektor energi menjadi salah satu tujuan yang tertulis dalam rancangan strategis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Turki untuk tahun 2015-2019<sup>17</sup>:

*Liberalization process which has been experienced particularly within recent 15 years contributed to the capacity of Turkey for taking active role in surrounding markets and for showing effectiveness for the functioning of regional economies.*

Dalam hal ini, upaya dari proses liberalisasi Turki dalam bidang energi, difokuskan kepada upaya peningkatan peran Turki dalam pasar energi regional, serta transparansi dalam rangka menarik investasi. Liberalisasi pasar dalam sektor energi Turki dimulai dengan perluasan peran swasta dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (MENR) mewakili Pemerintah Turki, bersama dengan *Energy Market Regulatory Authority* (EMRA), dalam membentuk dasar hukum dan struktur regulasi yang mengatur keterlibatan perusahaan swasta dalam sektor energi.

Peningkatan peluang investasi dalam sektor energi, memberikan peluang yang sangat positif bagi kepentingan keamanan energi dan ekonomi Turki.

Memanfaatkan keuntungan geografisnya, menyediakan iklim kerja sama energi yang kooperatif untuk menjadikan Turki sebagai negara koridor energi, akan menambah devisa negara melalui sektor energi, terutama dalam penyediaan pasokan energi gas alam antara Rusia, Azerbaijan, menuju Eropa.

Upaya liberalisasi pasar energi, memberikan peluang bagi Turki dalam membangun infrastruktur penunjang, yang menjadi salah satu strategi penting Turki dalam memenuhi kebutuhan energi, yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Pembangunan pipa gas TANAP dan TurkStream tidak hanya memfasilitasi kepentingan geopolitik, namun juga akan memberi kontribusi besar pada upaya mengamankan kepentingan ekonomi Turki. Berdasarkan perhitungan ekonomi, menjadi negara koridor energi, memberikan peluang bagi Turki untuk mengekspor kembali pasokan gas ke pasar energi Eropa, dan memberi tambahan pemasukan dari biaya transit energi<sup>18</sup>.

Upaya liberalisasi dalam pasar energi Turki tersebut, membuka peluang bagi Turki dalam bermain dalam pasar energi global, sekaligus membangun suatu iklim kerja sama energi domestik yang lebih kompetitif dan membangun bagi sektor perekonomian Turki, Hal itu berjalan seiringan dengan upaya Turki memanfaatkan letak geografis serta mempermudah dalam beradaptasi dalam pengaruh geopolitik yang berkaitan mengenai kerja sama energi.

### C. Ketahanan Energi Dalam Negeri Turki

Ketahanan energi sangat mempengaruhi kajian keamanan energi. Ketahanan energi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lokasi dan beberapa gangguan alami dan buatan.

Bagi Turki dalam menjaga ketahanan energi, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh Turki dalam menjaga ketahanan energinya. Salah satu upaya yang ditunjukkan adalah melalui peningkatan program eksplorasi sumber daya energi domestik. Program eksplorasi sumber energi domestik tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Turki pada pasokan sumber energi impor. Optimalisasi terhadap eksplorasi terhadap sumber daya alam domestik, menjadi salah satu poin utama dalam rancangan strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Turki, tahun 2015-2019, terutama dalam pencarian sumber energi minyak dan gas alam. Ditegaskan dalam salah satu poin dalam rancangan strategis Turki yang tertulis:

*Domestic oil and natural gas exploration and production activities shall be increased until the end of the plan period*

Upaya tersebut akan terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni dengan peningkatan studi akan eksplorasi gas dan minyak bumi, dan meningkatkan pengeboran di beberapa daerah lepas pantai, dalam upaya menemukan ladang energi baru. Penambahan armada kapal pengebor telah dilakukan oleh Turki dalam rangka mendukung program eksplorasi di wilayah Laut Hitam maupun di Mediterranean. Saat ini Turki telah memiliki empat kapal pengebor aktif yang diberi



nama, Fatih, Yavuz, Kanuni, dan Abdulhamid Han, yang ikut berperan aktif dalam mendukung upaya Turki memperkuat ketahanan energinya<sup>19</sup>.

Pada bulan Agustus 2020, suatu terobosan positif telah ditunjukkan bagi upaya Turki dalam mengeksploitasi sumber daya alam domestiknya. Kapal Pengebor, Fatih, menemukan ladang gas baru di lepas pantai Sakarya, seluas 250-kilometer persegi, dan diperkirakan dapat didistribusikan untuk memenuhi permintaan energi gas alam domestik pada tahun 2023. Namun upaya tersebut tidak berjalan semudah yang diperkirakan. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus eksplorasi ladang gas Sakarya, lokasi penemuan ladang gas yang terletak 4,5 km di bawah permukaan laut, dan kedalaman 2 km, serta kondisi lokasi yang ekstrim dan bersifat anoxic, menyebabkan para akademisi geologi, meragukan kemampuan *Turkish Petroleum Corporation* (TPAO) dalam mengeksplorasi ladang minyak Sakarya<sup>20</sup>.

Beberapa tantangan lain yang perlu diperhatikan oleh Turki berkenaan mengenai kondisi perekonomian yang sedang memburuk akibat inflasi serta pandemi COVID-19, yang menyebabkan resesi bagi perekonomian Turki. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri, bagi Pemerintah Turki dalam mengamankan investasi, terutama dalam beberapa proyek eksplorasi sumber energi dalam negeri, yang membutuhkan dana besar. Menjadi tantangan bagi upaya Turki mengamankan ketahanan energi.

Meskipun begitu, upaya untuk memastikan ketahanan energi tetap akan dilanjutkan oleh Turki, ditengah tantangan resesi ekonomi dan situasi geopolitik

global, dalam rangka memastikan ketahanan energi dimasa depan dapat terjamin. Hal itu ditunjukkan dengan rencana melanjutkan program pengeboran laut dalam, sebagai upaya eksplorasi sumber daya energi. Melalui perluasan eksplorasi di wilayah Laut Hitam dan Mediterrania Timur. Rencana tersebut sempat menemui hambatan, bahkan memantik eskalasi antara Turki dan Yunani, terkait mengenai eksplorasi sumber daya alam di kawasan utara Cyprus dan Laut Aegea. Namun sengketa tersebut tidak menghalangi ambisi Pemerintah Turki untuk melanjutkan misinya mencari sumber daya energi domestik, yang mampu memastikan ketahanan energi dalam negeri Turki<sup>21</sup>.

Memastikan ketahanan energi sangat perlu dilakukan, untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan dari ketergantungan energi, serta mewujudkan mimpi Republik Turki yang lebih independen, baik melalui diversifikasi pemasok energi impor, maupun melalui pengeboran sumber energi dalam negeri. Pemenuhan energi yang lebih mandiri, dapat berperan penting bagi keamanan energi serta mengamankan kepentingan ekonomi dan geopolitik Turki, ditengah ketidakpastian iklim geopolitik global, yang disebabkan akibat krisis di Ukraina.

#### **D. Pengembangan Energi Terbarukan Turki**

Konsumsi energi Turki saat ini, mayoritas masih bergantung kepada energi berbahan dasar fosil, seperti batu bara, minyak bumi dan gas alam, yang sebagian besar masih bergantung pada pasokan impor. Ditengah komitmen global akan pengembangan energi yang bersih tersebut, pengembangan energi terbarukan telah menjadi salah satu tujuan utama dari upaya pemenuhan energi dalam negeri Turki.

Menurut data dari *Eleventh Development Plan* Turki (2019-2023), pada tahun 2018, total penggunaan energi terbarukan untuk generator listrik dalam negeri, mengalami peningkatan dalam jangka waktu lima tahun, pada tahun 2013, persentase penggunaan energi terbarukan Turki hanya sekitar 28,9% menjadi 32,5% pada tahun 2018<sup>22</sup>.

Dalam rangka pengembangan sumber energi terbarukan, Turki memiliki potensi yang besar dalam pengembangan energi terbarukan, untuk menggerakkan energi listrik dan generator pemanas. Beberapa variasi sumber daya alam, seperti angin, solar, panas bumi (*geothermal*), dan energi biomassa dapat dikembangkan sebagai upaya pemenuhan energi terbarukan dan mendukung kemajuan ekonomi. Dalam hal ini, Pemerintah Turki perlu mengembangkan suatu regulasi pasar yang tepat guna, perbaikan infrastruktur, serta menarik investasi besar dalam rangka membantu pengembangannya.

Dalam rencana energi strategis tahun 2015-2019, yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu tema vital yang ditawarkan dalam rencana tersebut. Dalam rancangan strategis tersebut, pengembangan energi terbarukan merupakan salah satu upaya Turki dalam mendiversifikasi pasokan energinya.

Terdapat 11 sasaran dalam upaya pengembangan diversifikasi energi Turki, sebagai bagian dari rencana strategis tahun 2015-2019. Sasaran tersebut meliputi<sup>23</sup>:

1. *Electricity generation from domestic coal shall be increased, to 60 billion kWh annually by the end of the plan period,*
2. *Transformation of existing domestic coal resources into electricity generation investments and exploration of new resources shall be provided,*
3. *The share of renewable energy resources in primary energy supply and electricity generation shall be increased,*
4. *Nuclear energy shall be included into electricity generation portfolio,*
5. *Coverage ratio of domestic and imported crude oil production against consumption shall be increased to 13.6%,*
6. *Hydrocarbon potential which may be obtained through unconventional methods shall be determined,*
7. *Diversification of import countries and routes shall be provided by adding new source countries and routes into natural gas import portfolio,*
8. *Domestic oil and natural gas exploration and production activities shall be increased until the end of the plan period,*
9. *The share of natural gas in electricity generation within total generation shall be reduced to 38% until the end of the plan period,*
10. *Necessary feasibility studies regarding the expansion of LPG and dumped LNG use in the regions, where natural gas cannot be supplied, shall be completed. Strategy and road map studies shall be accomplished if deemed feasible,*
11. *Domestic uranium and thorium resources shall be explored and developed so as to be used as fuel in nuclear power plants.*

Upaya pengembangan energi terbarukan, merupakan salah satu komponen penting bagi upaya Turki dalam memenuhi keamanan energinya. Faktor lingkungan merupakan salah satu fokus utama global di era abad ke-21 ini untuk mengurangi efek penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan. Sebagai bagian dari komunitas global, Pemerintah Turki berkomitmen untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi efek gas rumah kaca dan perubahan iklim, ditengah upaya untuk mengakomodasi tantangan dan konsekuensinya pada sektor perekonomian.

Keseriusan Turki dalam memenuhi kerangka kesepakatan PBB dalam rangka mengatasi perubahan iklim, ditunjukkan dalam *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC) pada bulan Oktober 2015. Dalam INDC ini, terdapat beberapa kebijakan dan rencana yang akan mengatur bagaimana sektor energi, industri, transportasi, tata kota, dan pertanian Turki, akan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change*.

Dalam poin INDC tersebut, salah satu upaya Turki dalam memenuhi komitmennya dalam pengembangan energi hijau, adalah melalui peningkatan kapasitas pemenuhan energi listrik hingga tahun 2030 melalui tenaga surya dan angin, serta proyek pengembangan energi nuklir. Beberapa proyek pembangunan reaktor nuklir telah dipertimbangkan oleh Turki, dalam rangka mencukupi kebutuhan energi yang bersih dan berkelanjutan. Dari tiga reaktor energi nuklir yang rencana akan dibangun, konstruksi pembangunan reaktor nuklir Akkuyu telah dimulai pada tahun 2018, dan direncanakan akan selesai dan beroperasi di tahun 2023<sup>24</sup>. Selain itu, dalam bidang industri, Turki berkomitmen untuk mengurangi

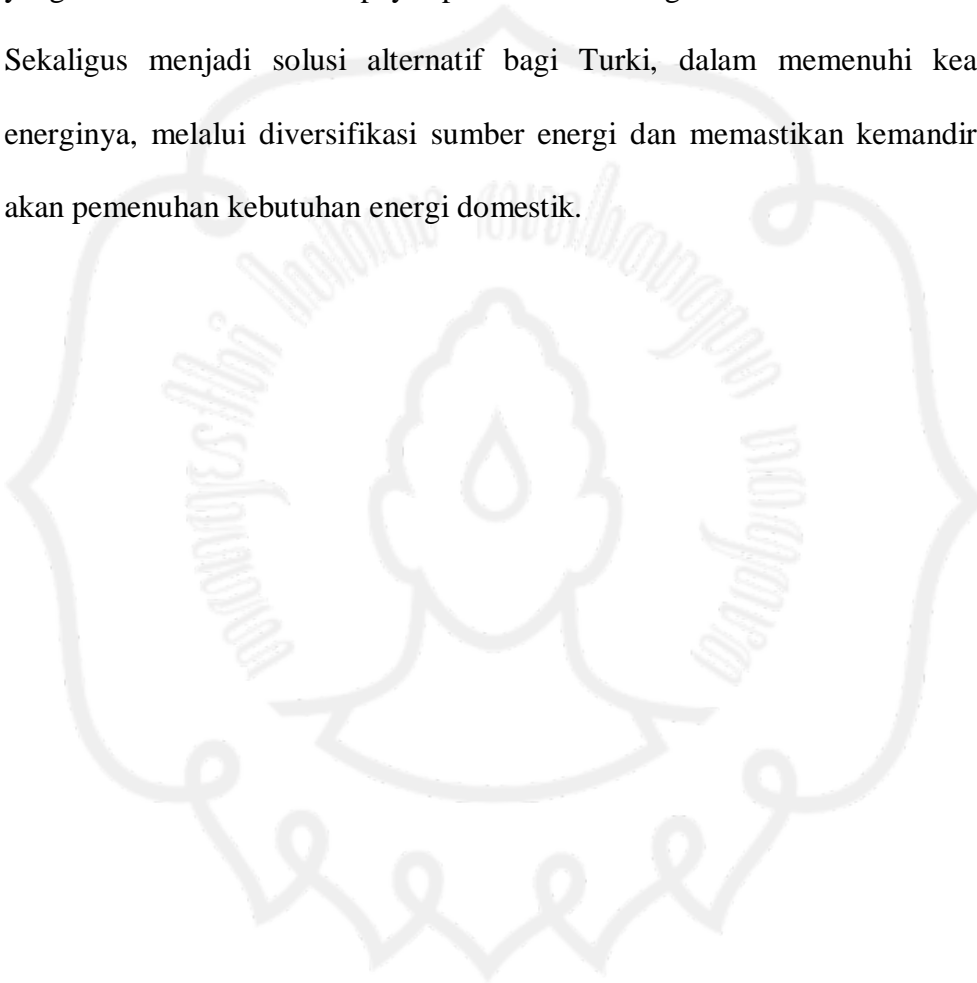
emisi, melalui kebijakan yang sesuai dengan kebijakan perubahan iklim nasional, serta menyediakan bantuan finansial bagi beberapa proyek efisiensi energi<sup>25</sup>.

Bersamaan dengan komitmen global untuk mengurangi efek negatif gas rumah kaca dan perubahan iklim, pada tahun 2021, Pemerintah Turki akhirnya meratifikasi Kesepakatan Paris, yang disepakati oleh PBB pada bulan Desember 2015 lalu<sup>26</sup>. Dalam kesepakatan ini, seluruh negara di dunia, baik yang maju dan berkembang, sepakat untuk mengantisipasi perubahan iklim dengan komitmen untuk mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan. Melalui sidang parlemen Turki tersebut, 353 anggota menyetujui ratifikasi Paris Agreement dalam upaya Turki mengurangi efek perubahan iklim<sup>27</sup>. Bersamaan dengan itu, Turki juga berkomitmen untuk menetapkan 2053 sebagai target *net-zero carbon*.

Ratifikasi Turki pada Paris Agreement 2015 memiliki perjalanan yang cukup panjang dan melibatkan beberapa proses negosiasi, meskipun menjadi salah satu negara yang menandatangani Kesepakatan Paris pada tahun 2016, namun Turki saat itu belum menemukan kata sepakat dalam menentukan status Turki, sebagai negara maju dan negara berkembang. Penentuan status tersebut cukup penting, dikarenakan adanya beberapa poin utama yang lebih menekan negara-negara dengan status negara maju, akan komitmen mengurangi emisi di tahun 2030. Namun pada akhirnya, Turki melalui lembaga legislatifnya, sepakat meratifikasi keikutsertaan Turki dalam Paris Agreement 2015 ini, dengan status negara berkembang.



Ratifikasi Turki pada Kesepakatan Paris 2015, memberikan bukti komitmen Pemerintah Turki dalam upaya global dalam mengurangi dampak negatif buatan manusia, yang berkontribusi pada efek gas rumah kaca dan perubahan iklim. Hal ini juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan, menjadi salah satu pilar penting, yang akan menentukan upaya pemenuhan energi Turki dimasa mendatang. Sekaligus menjadi solusi alternatif bagi Turki, dalam memenuhi keamanan energinya, melalui diversifikasi sumber energi dan memastikan kemandiriannya akan pemenuhan kebutuhan energi domestik.



## Catatan Akhir

- 
- <sup>1</sup> Austvik, Ole Gunnar. (2018). Concepts of Geopolitics and Energy Security. IAAE Energy Forum
- <sup>2</sup> De Jong, Sijbren. Wouters, Jan. Sterkx, Steven. (2010). The 2009 Russian-Ukrainian Gas Dispute: Lessons for European Energy Crisis Management after Lisbon. European Foreign Affairs Review. <https://cris.unu.edu/sites/cris.unu.edu/files/EUGRASP%20De%20Jong%20-%20Wouters%20-%20Sterkx.pdf>
- <sup>3</sup> Council of the European Union. (January 8, 2009). EU Declaration on the Russia/Ukraine Problem and Energy Security. Council Doc
- <sup>4</sup> Schislyaeva, Elena. Evgrafova, Irina. Nadezhda, Butakova. (2022). The EU, Russia, Turkey energy triangle: legal and economic conditions of gas transportation via the TurkStream pipeline. Transportation Research Procedia
- <sup>5</sup> [https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/diversification-gas-supply-sources-and-routes\\_en](https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/diversification-gas-supply-sources-and-routes_en)
- <sup>6</sup> Council of European Union. EU restrictive measures against Russia over Ukraine (since 2014). Retrieved December 26, 2022, from <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/#economic>
- <sup>7</sup> Pearson, Robert. (March 28, 2022). Turkey between Ukraine and Russia. Retrieved November 26, 2022, from <https://www.mei.edu/publications/turkey-between-ukraine-and-russia>
- <sup>8</sup> Ozcan, Gencer. (2012). Policy of Zero Problems with the Neighbours. Retrieved October 12, 2022, from <https://www.iemed.org/publication/policy-of-zero-problems-with-the-neighbours/>
- <sup>9</sup> <https://www.tanap.com/en/agreements>
- <sup>10</sup> <https://www.tanap.com/en/southern-gas-corridor>
- <sup>11</sup> Kaminski, Krzysztof. (2020). In Russia's Gas Grip: Nord Stream 2 and TurkStream. New Direction. 11-15
- <sup>12</sup> BBC News. (December 1, 2014). Russia drops South Stream gas pipeline plan. Retrieved October 10, 2022, from <https://www.bbc.com/news/world-europe-30283571>
- <sup>13</sup> CRS Report. (May 6, 2021). TurkStream: Russia's Southern Pipeline to Europe. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11177>
- <sup>14</sup> <https://www.trade.gov/energy-resource-guide-turkey-oil-and-gas>
- <sup>15</sup> Kolisnichenko, Vadim. (September 1, 2022). Turkey increased electricity and natural gas prices for industrial users by 50%. Retrieved January 11, 2023, from <https://gmk.center/en/news/turkey-increased-electricity-and-gas-natural-prices-for-industrial-users-by-50/>
- <sup>16</sup> Grigorenko, Yuriy. (August 24, 2022). Turkish rolled steel producers are considering the possibility of stopping production. Retrieved January 11, 2023 from <https://gmk.center/en/news/turkish-rolled-steel-producers-are-considering-the-possibility-of-stopping-production/>
- <sup>17</sup> Republic of Turkey, Ministry of Energy and Natural Resources. (2014). Strategic Plan 2015-2019. 74-76
- <sup>18</sup> Ulgen, Sinan. Celikpala, Mitat. (November 11, 2017). TurkStream: Impact on Turkey's Economy and Energy Security. EDAM
- <sup>19</sup> Kulovic, Nermina. (August 18, 2022). Turkish drillship kicks off drilling operations in Mediterranean. Retrieved January 12, 2023, from <https://www.offshore-energy.biz/turkish-drillship-kicks-off-drilling-operations-in-mediterranean/>
- <sup>20</sup> Energy Brief. (June 30, 2021). Turkey may require a partner to develop Sakarya Gas Field. Retrieved January 12, 2023, from <https://energy-europe.eu/exploration/turkey-may-require-a-partner-to-develop-sakarya-gas-field/>

- 
- <sup>21</sup> Yermakov, Vitaly. (June 15, 2021). Sakarya gas discovery gives Turkey a winning combination of cards. Retrieved January 12, 2023, from <https://www.aa.com.tr/en/energy/analysis/sakarya-gas-discovery-gives-turkey-a-winning-combination-of-cards/32962>
- <sup>22</sup> Presidency of Strategy and Budget. 100<sup>th</sup> Year Turkey Plan, Eleventh Development Plan (2019-2023)
- <sup>23</sup> Ministry of Energy and Natural Resources. (2014). Strategic Plan 2015-2019. 36-41
- <sup>24</sup> International Energy Agency. (2021). Energy Policy Review: Turkey 2021. Retrieved January 2, 2023, from <https://www.iea.org/reports/turkey-2021>
- <sup>25</sup> Republic of Turkey, Intended Nationally Determined Contribution. (2015)
- <sup>26</sup> Paris Agreement. <https://sdgs.un.org/frameworks/parisagreement>
- <sup>27</sup> Altaeb, Malak. (October 27, 2021). Turkey finally ratified the Paris Agreement. Why now. Retrieved January 3, 2023, from <https://mei.edu/publications/turkey-finally-ratified-paris-agreement-why-now>

